

**KUALITAS PENGAWASAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI
KECAMATAN PADANG UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata Satu (S1) Pada Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan*



**Oleh:
QORI KHAIRUNISHA
NIM: 15002066**

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

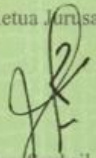
KUALITAS PENGAWASAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI
KECAMATAN PADANG UTARA

Nama : Qori Khairunisha
NIM/TM : 15002066/2015
Jurusan/Prodi : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, November 2019

Disetujui Oleh

Ketua Jurusan


Drs. Syahril, M.Pd, Ph.D
NIP. 19630424 198811 1 001

Pembimbing


Dra. Anisah, M.Pd
NIP. 19630614 198903 2 001Scanned with
CamScanner

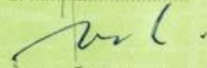
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji
Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Judul : Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan
Padang Utara
Nama : Qori Khairunisha
NIM/BP : 15002066/2015
Jurusan/Prodi : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, November 2019

Tim Penguji,

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dra. Anisah, M.Pd	1. 
2. Anggota : Dr. Rifna, M.Pd	2. 
3. Anggota : Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd	3. 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qori Khairunisha
NIM/TM : 15002066/2015
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Kualitas Pengawasan Pendidikan Di SMP Negeri
Kecamatan Padang Utara

- Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar karya tulis saya sendiri dan benar-benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia bertanggung jawab dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, September 2019
Saya yang menyatakan .



Qori Khairunisha
NIM. 15002066

ABSTRAK

Qori Khairunisha, 2019. “Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang menunjukkan masih kurang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staff di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara berjumlah 140 orang. Untuk penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik *Proportional Stratified Random Sampling* yang diperoleh sebanyak 63 orang. Instrument penelitian yang digunakan berupa angket dalam bentuk skala likert dengan alternatif jawaban Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Angket tersebut sudah diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan berada pada kategori berkualitas dengan skor rata-rata 4,00, 2) penyusunan program pengawasan disekolah didasarkan pada standar nasional pendidikan berada pada kategori berkualitas dengan skor rata-rata 4,09 3) program pengawasan disosialisasikan ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berada pada kategori berkualitas dengan skor rata-rata 4,09. 4) pengawasan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan berada pada kategori cukup berkualitas dengan skor rata-rata 3,51. 5) sekolah dan pengawas sekolah berada pada kategori cukup berkualitas dengan skor rata-rata 3,54 Secara keseluruhan Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara berada pada kriteria berkualitas dengan skor 3,85.

Kata kunci : Kualitas, Pelaksanaan Standar, Pengawasan,

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara**”. Penelitian ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Anisah, M.Pd, selaku pembimbing yang telah membantu penulis dengan semangat dan motivasinya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Rifma, M.Pd selaku penguji I dan Bapak Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini
3. Dekan dan wakil dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu penulis dalam hal akademik dan administrasi.
4. Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu dalam pengurusan administrasi sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
5. Bapak Drs. Syahril, M.Pd.,Ph.D dan Bapak Dr. Hanif Alkadri, M.Pd selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan yang telah memberikan informasi terkait dengan pengurusan skripsi.

6. Kepala Sekolah SMP Negeri Kecamatan Padang Utara selaku pimpinan memberikan izin untuk melakukan penelitian. .
7. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang telah bersedia menjadi sumber data bagi penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teristimewa untuk mama dan papa yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan moril, material, dan do'a. Kepada kakak dan adek yang selalu memberikan dukungan moril, material, dan motivasi untuk penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan menjadi sarjana.
9. Tidak lupa kepada rekan seperjuangan Jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2015 yang selalu memberikan bantuan dan semangat baik secara moril dan spiritual kepada penulis.
10. Semua pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritikan dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat.

Padang, Oktober 2019

Penulis
Qori Khairunisha
Nim15002066/2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Asumsi Penelitian	6
F. Pertanyaan Penelitian.....	7
H. Tujuan Penelitian.....	7
I. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Indikator Pengawasan Pendidikan.....	23
C. Penelitian Relevan	32
D. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	42
E. Instrumen Penelitian	42
F. Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi Penelitian di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara	37
Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara	41
Tabel 3. Skala Kategori Penilaian.....	48
Tabel 4. Deskripsi Data Dari Aspek Sekolah Menyusun Program Pengawasan Secara Obyektif, Bertanggung Jawab, Dan Berkelanjutan.....	50
Tabel 5. Deskripsi Data Dilihat Dari Aspek Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan	52
Tabel 6. Deskripsi Data Dari Aspek Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.....	54
Tabel 7. Deskripsi Data Dari Aspek Pengawasan Sekolah Meliputi Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ..	56
Tabel 8. Deskripsi Data Dari Aspek Pengawasan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah ...	58
Tabel 9. Rekapitulasi Keseluruhan Data Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	75
Lampiran 2. Angket Uji Coba Penelitian	77
Lampiran 3. Tabel Analisis Uji Coba	85
Lampiran 4. Analisis Hasil Uji Coba Angket Penelitian	86
Lampiran 5. Nilai-nilai R <i>Product Moment</i>	91
Lampiran 6. Angket Penelitian	92
Lampiran 7. Data Mentah Hasil Penelitian.....	101
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan.....	102
Lampiran 9. Surat Balasan Penelitian dari SMP Negeri 7 Padang.....	103
Lampiran 10. Surat Balasan Penelitian dari SMP Negeri 40 Padang.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk masyarakat dalam memajukan negara dan juga sangat penting dalam proses pembangunan negara untuk menjadi negara yang lebih maju.

Pentingnya fungsi pendidikan bagi sebuah bangsa juga dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Bab II Pasal 3 yang berisi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrat serta bertanggung jawab.

Dalam berjalannya proses pendidikan, pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan prestasi belajar dan kualitas sekolah. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan

memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Jasmani & Syaiful, 2013 : 30) Secara substansi, pengawasan pendidikan pada hakekatnya menunjuk pada usaha dan bantuan pengawas kepada stakeholder pendidikan terutama pendidik yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan pembelajaran. Bantuan yang diberikan harus berdasarkan pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif, dan bantuan yang diberikan harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi proses pembelajaran.

Pengawasan merupakan tindakan manajemen yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengendalikan organisasi sesuai dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana kegiatan yang dilakukan organisasi atau lembaga. Pengawasan ini secara keseluruhan menyatu dengan sistem manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan adanya pengawasan, maka setiap pegawai yang ada didalam organisasi pada masing-masing bidangnya akan mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan tugas yang diembankan dan tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Standar pengawasan pendidikan meliputi : 1) Penyusunan program pengawasan secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. 2) Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan. 3) Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 4) Pengawasan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 5) Pengawasan akademik

dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jika kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka diharapkan dapat terwujudnya pengawasan pendidikan yang efektif dan efisien sehingga terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Pengawasan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu yang akan mewujudkan tujuan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Untuk mencapai pengawasan yang berkualitas, diperlukan pengawas yang paham tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dilakukan.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang semestinya. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan pengawasan pendidikan. Hal ini terlihat dari fenomena-fenomena sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program pengawasan belum dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hal ini terlihat pada program pengawasan yang dilakukan tidak transparan dan berkelanjutan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak berjalan dengan semestinya.
- 2) Penyusunan program pengawasan belum didasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan, hal ini terlihat pada penyusunan program yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan sehingga pengawasan terhadap standar tersebut belum terlaksana dengan baik.
- 3) Program pengawasan belum disosialisasikan secara maksimal kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini terlihat pada masih banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum mengerti tentang

pelaksanaan program pengawasan. Banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang beranggapan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan begitu pengawasan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4) Pengawasan di sekolah belum sepenuhnya meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini terlihat pada kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga hasil pengawasan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Evaluasi terhadap hasil kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga belum dilaksanakan secara maksimal sehingga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak menyadari adanya kesalahan yang mereka lakukan pada saat melaksanakan pekerjaan. Begitu pula dengan kurangnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Hal ini terlihat pada sangat jarang sekali tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan terhadap hasil kerjanya yang telah baik, dan kurang adanya solusi perbaikan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kesalahan terhadap pelaksanaan pekerjaannya.

5) Pengawasan akademik belum dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Hal ini terlihat pada pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak dilakukan secara teratur menurut jadwal yang telah ditentukan, dengan tidak teraturnya pengawasan

tersebut dapat mengakibatkan guru tidak mempersiapkan dirinya dalam kegiatan pengawasan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah

6) Pemilihan teknik pengawasan yang kurang tepat, hal ini terlihat pada teknik pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak sepenuhnya dipahami oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diawasinya, sehingga jalannya pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program pengawasan belum dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan
2. Penyusunan program pengawasan belum didasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan
3. Program pengawasan belum disosialisasikan secara maksimal kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pengawasan di sekolah belum sepenuhnya meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan
5. Pengawasan akademik belum dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah
6. Pemilihan teknik pengawasan yang kurang tepat

7. Pengawas belum memberikan arahan atau bimbingan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk memperbaiki kekurangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan sebelumnya, banyak sekali masalah yang muncul. Berdasarkan hal tersebut penulis membatasi masalah pada penyusunan program pengawasan yang dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan serta didasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan. Program pengawasan disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disajikan maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara”

E. Asumsi Penelitian

Setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan standar pengawasan pendidikan yang terdapat di dalam Standar Pengelolaan Pendidikan

F. Pertanyaan Penelitian

1. Seberapa berkualitas penyusunan program pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan ?
2. Seberapa berkualitas penyusunan program pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara didasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan ?
3. Seberapa berkualitas program pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ?
4. Seberapa berkualitas pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan ?
5. Seberapa berkualitas pengawasan akademik di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah ?

H. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Penyusunan proogram pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan
2. Penyusunan program pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan

3. Program pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara disosialisasikan ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan
5. Pengawasan akademik di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.

I. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat secara praktis

a. Bagi Lembaga

Sebagai bahan untuk dijadikan pedoman untuk merumuskan dan menetapkan program pengawasan sekolah di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara sehingga mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

b. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mengembangkan ilmu yang telah dipelajari secara teori.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi pengembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang administrasi pendidikan khususnya mengenai pengawasan pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kualitas Pengawasan

Kualitas berkaitan dengan baik buruknya suatu benda, kadar atau derajat. Kualitas atau mutu berkaitan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar, atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan, standar ini menurut Depdiknas (2001) dalam Syaiful Sagala (2011: 169) dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Menurut Sallis (2002) dalam Amtu (2011: 118) menjelaskan bahwa kualitas atau mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya menurut Sallis (2002: 23), kualitas atau mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri.

Pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijelaskan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Duncan (Saputra, 2008:68) menyatakan bahwa pengawasan merupakan usaha yang dilakukan oleh pengawas untuk memberikan bantuan kepada individu dalam memperbaiki kinerjanya. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan memungkinkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk tertentu seperti advice, rekomendasi, keputusan, koreksi, dan sebagainya agar individu

pelaksana pekerjaan dapat meningkatkan kinerja atau memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam konteks ilmu manajemen secara umum menjadi rujukan dasar dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan, pengawasan bukanlah sekedar kontrol untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Melainkan lebih dari itu, pengawasan dalam pendidikan memiliki pengertian yang lebih luas. Kegiatan pengawasan dalam manajemen pendidikan meliputi penentuan syarat-syarat personal dan usaha untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Pengawasan tidak dapat diartikan sebagai proses untuk mengawasi dan usaha memperbaiki pengajaran saja, melainkan kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk memperbaiki terhadap proses hasil belajar mengajar.

Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan(controlling) yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti terus menerus, merekan, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan, dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen.

Pengawasan menurut Mockler (Stoner, 1996:592) adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan

dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan/ hambatan/ penyelewengan segera dilakukan tindakan koreksi. Untuk memperoleh hasil yang efektif, pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen tetapi pada setiap tingkatan proses manajemen.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan pendidikan merupakan proses sistematis untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar ditentukan sehingga dapat dipastikan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. .

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan secara umum bertujuan ditentukan dalam program kegiatan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah.

Menurut Fatah (1996:103) tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Artinya, melalui pengawasan apa yang telah ditetapkan dalam rencana dan program, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaannya serta

evaluasinya senantiasa dipantau dan diarahkan sehingga tetap berada dalam ketentuan.

Situmorang dan Juhir (1994:22) menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk tujuan sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah berjalan lancar atau tidak, 2) Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan tersebut atau mencegah timbulnya kesalahan yang baru, 3) Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, 4) Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, 5) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang tujuan pengawasan yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan dan dikontekstualisasikan dalam bidang pendidikan bahwa orientasi utama dari pengawasan pendidikan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Untuk memastikan kegiatan terlaksana, maka pengawasan dilakukan merujuk pada prosedur, standar, peraturan, rencana, tugas masing-masing personel dan kriteria untuk kerja.

3. Fungsi Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting. tanpa pengawasan, pelaksanaan kegiatan tidak terkendali, memungkinkan terjadinya penyimpangan, sehingga

tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai. Secara khusus dapat dikemukakan bahwa fungsi pengawasan pendidikan adalah:

Secara umum, pengawasan berfungsi agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan merupakan suatu hasil kerja yang sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditentukan (Saragih, 2008:22). Dalam konteks manajemen pendidikan secara luas, pengawasan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Informatif – Progresif

Pimpinan atau manajer pendidikan pada berbagai strata membutuhkan informasi tentang program, kegiatan atau proses pendidikan yang sedang dilaksanakan. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan berfungsi sebagai proses pencarian informasi tentang progres pencarian informasi tentang progres (kemajuan) pelaksanaan program atau kegiatan dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada informasi tersebut, pihak yang berwenang dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program atau kegiatan, apakah memerlukan percepatan, perbaikan, perubahan rencana, dan sebagainya.

b. Fungsi Pengecekan-Preventif

Manusia sebagai pelaksana program sangat mungkin melakukan kelalaian dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pengawasan dapat berfungsi sebagai langkah pengecekan dan pencegahan agar pelaksana kegiatan menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana, petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis, ketentuan atau standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Sekalipun perangkat pedoman pelaksanaan sudah sangat lengkap, kemungkinan kesalahan bisa saja terjadi. Untuk itu, diperlukan langkah pengecekan sekaligus sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

c. Fungsi Korektif

Berbagai kendala mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Ketika pelaksanaan suatu kegiatan dihadapkan pada berbagai kendala, sangat mungkin terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Pengawasan pendidikan memiliki fungsi korektif dalam arti bila sudah terjadi suatu kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka pengawas dalam batas tertentu diberikan kewenangan untuk mengarahkan atau melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan fungsi korektif ini diharapkan agar kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki sehingga tidak berlanjut menjadi kesalahan yang lebih banyak dan berakibat fatal, yakni tidak tercapainya tujuan atau target yang telah ditetapkan.

4. Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuasaan, dilakukan secara terus menerus secara preventif dan represif agar tugas yang diemban bawahan dapat terlaksana secara efektif

dan efisien terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Di dalam buku penjelasan mengenai pengawasan melekat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada Bab 1 dikemukakan sebagai berikut : pengawasan melekat ialah suatu kegiatan administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh Pimpinan suatu kerja untuk mencegah terjadinya salah urus dan meningkatkan sefisiensi dan efektifitas kerja sesuai dengan kebijaksanaan Menteri P dan K, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan melekat merupakan salah satu fungsi semua pimpinan dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pimpinan bawahan di lingkungan unit kerja. Maka, jika terjadi penyelewengan atau penyimpangan, dapat diluruskan secara dini.

Dengan pengawasan melekat yang efektif dan efisien dapat dicegah sendiri kemungkinan terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparat pendidikan dan kebudayaan yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil, dan berdaya guna. Pengawasan melekat dilakukan oleh setiap pimpinan atau atasan langsung, dan setiap pimpinan harus mampu melaksanakan secara periodik ataupun mendadak sampai dengan tiga eselon dibawahnya.

Tujuan pengawasan melekat ialah untuk mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian yang melekat padannya dengan baik sehingga bila ada

penyelewengan, pemborosan, korupsi, impinan unit kerja dapat mengambil tindakan kondisi sedini mungkin.

b. Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasi. Pengawas fungsional ini melaksanakan tugas kepengawasan secara komprehensif mulai dari pemeriksaan, verifikasi, konfirmasi, survei, monitoring, dan penilaian terhadap objek yang berada dalam pengawasan

c. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan represif merupakan teknik pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan atas pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. teknik ini dilakukan setelah program atau kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Prinsip Pengawasan Pendidikan

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengawasan adalah

- a. Tertuju kepada strategi sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan
- b. Kontrol harus menggunakan umpan balik sebagai revisi dalam mencapai tujuan.
- c. Harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan
- d. Cocok dengan organisasi
- e. Merupakan kontrol diri sendiri
- f. Bersifat langsung yaitu pelaksanaan control di tempat pekerja,
- g. Memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para petugas pendidikan .

6. Pendekatan Oleh Pengawas

a. Pendekatan Humanistik

Pendekatan ini timbul dari keyakinan bahwa kepala sekolah tidak dapat diperlakukan sebagai alat semata-mata untuk meningkatkan mutu belajar-mengajar dan pengelolaan kelembagaan secara menyeluruh. Tugas pengawas adalah membimbing. Pada kebanyakan kasus, pengawasan diidentikkan dengan tugas-tugas yang terkesan membebani bawahan, oleh sebab itu langkah yang harus dilakukan oleh pengawas beserta bawahannya adalah duduk bersama dan merumuskan kepentingan bersama

yang berorientasi pada kepentingan kelembagaan pendidikan secara menyeluruh

b. Pendekatan Kompetensi

Pendekatan ini mempunyai makna bahwa guru harus mempunyai kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Pendekatan kompetensi ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan pengawasan adalah membentuk kompetensi minimal yang harus dikuasai guru. Adapun teknik kompetensi yang menggunakan pendekatan kompetensi adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan kriteria untuk kerja yang dikehendaki
- 2) Menetapkan target untuk kerja
- 3) Menentukan aktivitas untuk kerja
- 4) Memonitor kegiatan untuk mengetahui unjuk kerja
- 5) Melakukan penilaian terhadap hasil monitoring
- 6) Adanya pembicaraan akhir.

Dalam pembicaraan akhir ini harus dirumuskan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unjuk kerja yang menjadi tanggung jawab guru sebab dalam hal ini guru menjadi tulang punggung terlaksananya kegiatan belajar mengajar.

c. Pendekatan Klinis

Menurut Richard Waller, definisi pendekatan klinis adalah pendekatan yang difokuskan kepada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan

tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional jadi, pendekatan klinis yaitu proses tatap muka antara pengawas dengan guru yang membicarakan hal mengajar dan ada hubungannya dengan hal itu yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesionalitas guru dan sekaligus untuk perbaikan proses pengajaran itu sendiri. Pembicaraan ini biasanya dipusatkan kepada penampilan mengajar guru berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengawas.

7. Proses dan Langkah-Langkah Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting bagi satuan pendidikan maupun proses manajemen pendidikan. Pengawasan merupakan upaya untuk menyelaraskan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar dapat mncapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan pengukuran atau perbaikan kerja dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai.

Pelaksanaan pengawasan dalam manajemen pendidikan perlu memperhatikan unsur-unsur dalam prosesnya. Schermerhorn (1984:446) menyebutkan ada empat unsur proses pengawasan, yaitu :

- a. Menetapkan sasaran dan standar kinerja
- b. Melakukan pengukuran kinerja
- c. Membandingkan antara hasil pengukuran kinerja dengan sasaran dan standar kinerja yang telah ditetapkan
- d. Melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan pada hasil perbandingan tersebut

Pendapat lain tentang proses pengawasan dikemukakan oleh Weihrich dan Koontz (2005:480) yang mengatakan ada tiga hal yang dilakukan, yaitu:

1. Menetapkan Standar

Yang dimaksud dengan standar adalah kriteria sederhana tentang kinerja. Ada sejumlah hal dari seluruh perencanaan program dimana kinerja dapat diukur, sehingga manajer dapat menerima sinyal tentang segala sesuatu yang dilakukan dan tidak perlu memantau keseluruhan langkah dari eksekusi rencana. Berkenaan dengan jenis standar, standar yang terbaik yang dapat digunakan dalam kegiatan pengawasan adalah tujuan dari sasaran yang dapat diverifikasi. Jenis standar lainnya diantaranya adalah standar fisik, standar biaya, standar modal, standar pemasukan, standar program, standar yang tidak tampak, dan tujuan sebagai standar.

2. Mengukur kinerja

Meskipun banyak pengukuran atau alat ukur yang tidak selalu dapat diterapkan, tetapi pengukuran kinerja dibandingkan dengan standar idealnya dapat dilakukan. Atau setidaknya pengukuran untuk mengetahui atau mendeteksi lebih dini bila terjadi kesalahan dan dihindari dengan tindakan yang tepat.

3. Memperbaiki Penyimpangan

Perbaikan atas deviasi atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana atau program dapat dilakukan dengan menggambarkan ulang rencana atau dengan memodifikasi tujuan. Atau kepada orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut dilakukan penjelasan tentang

tanggung jawabnya sehingga dapat segera melakukan perbaikan dengan teknik yang tepat.

8. Keterampilan Teknik dalam Pengawasan Pendidikan

Keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan yang efektif adalah :

a. Keterampilan Teknis

Dalam memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melakukan pekerjaan, seorang pengawas perlu memiliki keterampilan teknis yang menyangkut teknis penyelesaian pekerjaan di unit terkait.

b. Keterampilan Administratif

Keterampilan ini antara lain mencakup pengetahuan dan keterampilan membuat dan mematuhi prosedur operasional, peraturan atau pedoman perilaku yang berlaku, membuat laporan dinas, laporan bulanan, menyusun anggaran, membuat proposal, dan melakukan pekerjaan administratif lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan

c. Keterampilan Interpersonal

Keterampilan ini menuntut seorang pengawas untuk mengelola hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Keterampilan ini juga mencakup kemampuan menangani permasalahan yang timbul di tempat kerja. Pengawas yang memiliki keterampilan ini akan lebih mudah menggali dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung keputusan yang dibuat dan menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan, serta mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

d. Keterampilan Membuat Keputusan

Seorang pengawas diberikan tanggung jawab untuk membuat berbagai keputusan di departemen atau divisi yang dipimpinnya. Semua keputusan itu akan mempengaruhi jalannya kegiatan operasional dan berdampak pada tercapainya target yang telah ditetapkan. Jadi seorang supervisor perlu membekali diri dengan keterampilan yang penting ini, misalnya mengembangkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang berhasil dikumpulkan, baik melalui data statistik ataupun hasil survei lainnya, metode keputusan yang didasarkan pada penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil.

9. Kompetensi Pengawas Pendidikan

Kompetensi utama seorang pengawas terletak pada kemampuan personalnya. Mann (1965) mengatakan bahwa persyaratan untuk semua pengawas yaitu : teknikal, human, manajemen atau administratif. Ketiga kompetensi tersebut disebut gabungan keterampilan.. keterampilan manajerial mencakup perencanaan, organisasi, staffing, pendelegasian tanggung jawab, pengarahan, dan pengendalian. Keterampilan human dalam pengawasan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau melakukan perubahan untuk perbaikan atau peningkatan. Untuk itu seorang pengawas harus mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk kemampuan

menyampaikan saran dengan baik. Jadi seorang pengawas harus menguasai pengetahuan tentang substansi yang dipantau dan dievaluasi, memiliki keterampilan berhubungan dengan orang lain termasuk berkomunikasi, dan memiliki keterampilan dalam pengelolaannya.

10. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan

Ada beberapa faktor penghambat dalam pengawasan, yaitu :

- a. Perasaan sungkan yang berlebihan. Perasaan demikian ini menjadi penyebab pengawas tidak sampai hati bila bermaksud mengadakan pengawasan, jadi pasti akan menghambat tugas-tugas pengawasan.
- b. Takut terhadap pengawas. Hal demikian dapat terjadi karena pengawasan, secara umum sekedar mencari-cari kesalahan. Tidak jarang mereka yang akan diawasi, mempersiapkan terlebih dahulu sebelum pengawas datang, dengan maksud apa yang terjadi dalam realitas yang sebenarnya menyenangkan pengawasannya. Padahal, diakui atau tidak, menutupi hal-hal yang sebenarnya terjadi ini justru akan menyulitkan pengawas jika mengadakan perbaikan. Tampaknya, kebanyakan mencari-cari kesalahan saja dan tidak mengadakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan, menjadikan penyebab bawahan atau mereka yang diawasi tidak menunjukkan performa yang sebenarnya.

B. Indikator Pengawasan Pendidikan Berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, Standar Pengelolaan Bidang Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
- 2) Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan
- 3) Program pengawasn disosialisasikan ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Pengawasan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 5) Pengawasan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah

Berdasarkan objek penelitian, maka indikator yang relevan dengan objek penelitian ini adalah :

1. Sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif , bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pengawasan yang obyektif berarti pengawasan dilakukan secara transparan terhadap bawahan. Pengawas mensosialisasikan tentang pengawasan yang akan dilakukan, serta menjelaskan kepada bawahan tentang apa saja aspek yang akan diawasi. Dengan adanya pengawasan yang obyektif ini, bawahan akan memahami maksud dari kegiatan pengawasan, dan bawahan tidak akan menganggap bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan.

Pengawasan yang bertanggung jawab akan sangat penting dilakukan karena pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pekerjaan

bawahan. Sedangkan pengawasan yang berkelanjutan merupakan pengawasan yang rutin dilakukan di waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan ini, pengawas akan mengetahui apa tindak lanjut yang dapat dilakukan jika bawahan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, diperlukan persiapan untuk mendapatkan hasil pengawasan yang berkualitas. Pengawasan yang dilakukan secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan akan menghasilkan pendidikan yang baik dan sebagaimana mestinya. Pengawasan yang dilakukan secara objektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Karena dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut,

2. Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan

Pengawasan yang berkualitas dapat dicapai dengan penyusunan program pengawasan yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan ini adalah sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Standar tersebut terdiri dari delapan point yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan yang

berada di Indonesia. Berikut ini adalah delapan Point dari Standar Nasional Pendidikan :

a. Standar Kompetensi Lulusan

Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik menggunakan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal-hal yang diatur dalam penyusunan program pengawasan bidang standar kompetensi lulusan mencakup standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

b. Standar Isi

Hal-hal yang diatur dalam Standar Isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam penyusunan program pengawasan bidang standar isi ini terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar Proses

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Proses belajar mengajar ini juga memberikan ruang bagi kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan psikologis/fisik para peserta didik.

c. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat rohani dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dalam penyusunan program pengawasan bidang standar pendidik dan tenaga kependidikan, mengacu pada standar tenaga pendidik dan kependidikan seperti tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboran, dan tenaga layanan khusus.

d. Standar Sarana dan Prasarana

Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perabot, dan perlengkapan lainnya. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan prasarana pendidikan seperti lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan dan prasarana pendukung lainnya.

e. Standar Pembiayaan Pendidikan

Beberapa hal yang termasuk di dalam Standar Pembiayaan Pendidikan adalah biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan mencakup biaya pengadaan prasarana

dan sarana pendidikan, modal kerja tetap, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam penyusunan program pengawasan bidang standar pembiayaan pendidikan, mencakup kepada biaya operasi satuan pendidikan dan biaya personal.

Biaya operasi satuan pendidikan mencakup gaji tenaga pendidik, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal mencakup biaya pendidikan yang harus dibayar peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar.

f. Standar Penilaian Pendidikan

Penyusunan program pengawasan di dalam standar penilaian pendidikan diantaranya penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

3. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Mensosialisasikan program pengawasan kepada tenaga pendidik dan kependidikan sangat penting dilakukan untuk mencegah asumsi pegawai yang umumnya takut terhadap diadakannya kegiatan pengawasan. Pegawai menganggap bahwa pengawasan dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan pegawai semata.. Program pengawasan dapat disosialisasikan melalui berbagai cara, misalnya pada saat rapat majelis guru ataupun acara formal dan non formal lainnya.

4. Pengawasan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pengawasan dilakukan terlebih dahulu dengan tahap pemantauan. Pemantauan aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Pemantauan dilakukan untuk satu langkah pembelajaran termasuk kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan belajar hasil belajar siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk proses pemantauan, seperti dilakukan diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, wawancara, wawancara, perekaman kegiatan belajar mengajar di kelas dan juga lainnya. Pemantauan diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Setelah kegiatan pemantauan dilaksanakan, selanjutnya dilakukan kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya dan bukan semata-mata kesalahannya. Untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. Supervisi dilakukan untuk melihat bagian mana dari kegiatan sekolah yang masih negatif untuk diupayakan menjadi positif, dan melihat mana yang sudah positif untuk ditingkatkan menjadi lebih positif lagi dan yang terpenting adalah pembinaannya.

Selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi. Evaluasi pendidikan itu dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan dalam penentuan nilai

dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan, atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Atau singkatnya, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Tahapan evaluasi hasil pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Identifikasi masalah-masalah yang ditemukan pada saat melaksanakan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 SNP, dan penilaian kinerja guru.
- b. Rumuskan masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya dari setiap kegiatan pengawasan.
- c. Berikan analisis terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan tersebut, melalui analisis kuantitatif atau analisis kualitatif
- d. Evaluasi hasil pengawasan sebagai bahan penyusunan rekomendasi terhadap guru, kepala sekolah maupun Dinas Pendidikan serta untuk perbaikan program pengawasan berikutnya.

Selanjutnya adalah pelaporan. Laporan pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan tersebut. Pelaporan diberikan dalam bentuk laporan yang dimaksudkan untuk melakukan tindak lanjut. Penyusunan laporan bertujuan untuk :

- a. Memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan yang menjadi tujuan pengawasan.

- b. Memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil pengawasan akademik maupun manajerial berupa hasil pembinaan, pemantauan, dan penilaian.
- c. Menginformasikan berbagai faktor pendukung dan penghambat/kendala dalam pelaksanaan setiap butir kegiatan pengawasan sekolah.

Tindak lanjut ini merupakan sikap apa yang tepat untuk dilakukan untuk menindak lanjuti hasil pengawasan, apakah pegawai tersebut akan diberikan sanksi jika terdapat kesalahan yang diperbuat, atau akan mendapatkan rewards atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Penyusunan program tindak lanjut diawali dengan melakukan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan analisis hasil pengawasan. Analisis kebutuhan merupakan upaya menentukan perbedaan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dipersyaratkan dan yang secara nyata dimiliki. Bentuk tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan :

a. Pembinaan Langsung

Pembinaan yang dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil pengawasan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana

komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, tidak menonjolkan otoritas, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya.

b. Pembinaan Tidak Langsung

Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis pengawasan. Peran kepala sekolah dalam pembinaan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah.

5. Pengawasan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Pengawasan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sangat berdampak terhadap hasil kerja pegawai. Hasil kerja yang baik dapat diperoleh dari pengawasan yang berkualitas.

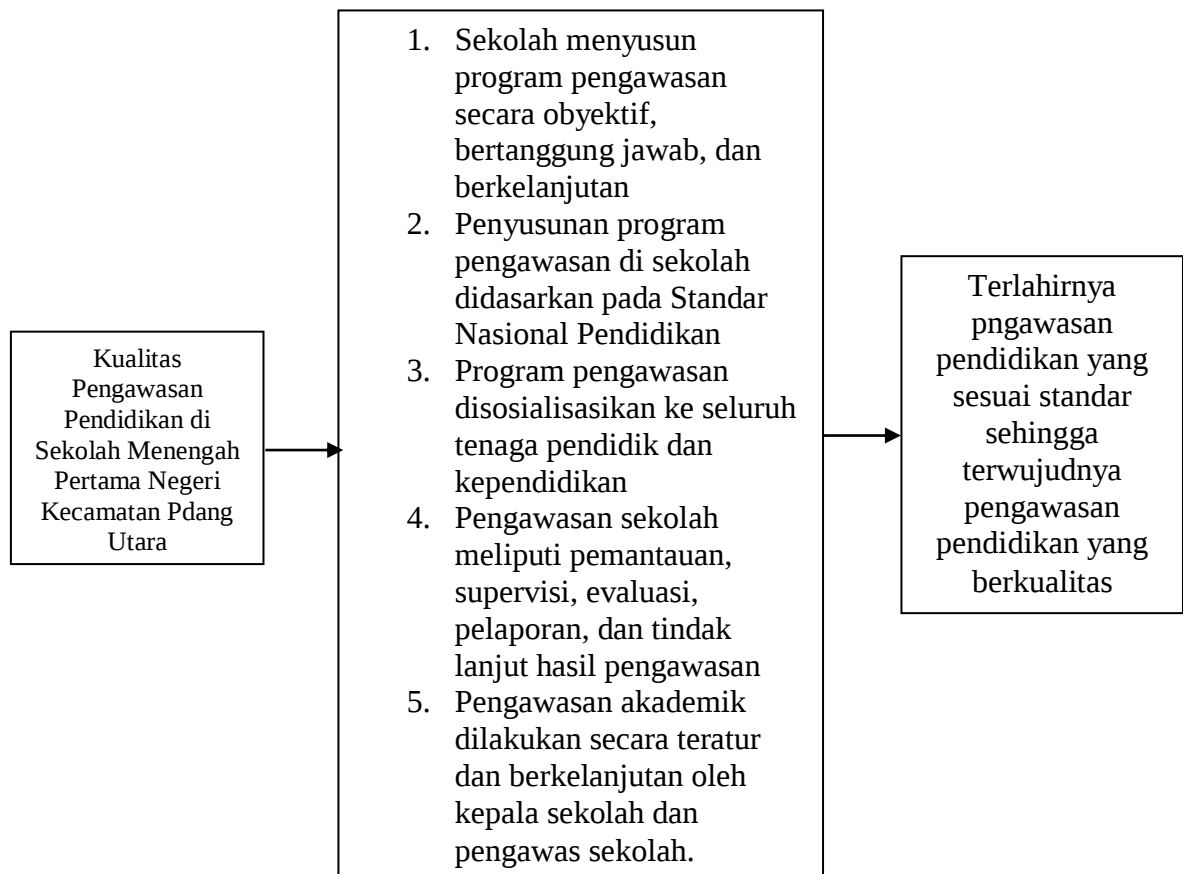
C. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan yang akan penulis lakukan adalah penelitian dari Mike Saiyuni Rahmadhani (2017) dengan judul “Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Ditinjau Dari Pengawasan dan Evaluasi Pada SMK Kartika 1-1 Kota Padang”. Dari hasil penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu penelitiannya membahas tentang pengelolaan pengawasan pendidikan, sementara perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya, peneliti sebelumnya melakukan penelitian di SMK Kartika 1-1

Padang, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan dilaksanakan di SMP Negeri se-Padang Utara.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui kualitas pengelolaan pengawasan pendidikan sekolah, secara sistematis kerangka konseptual penelitian ini memperlihatkan pengelolaan perencanaan program yang meliputi penyusunan program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1. Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sekolah menyusun program pngawasan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan berada pada kategori berkualitas dengan skor rata-rata 4,00.
2. Penyusunan program pengawasan disekolah didasarkan pada standar nasional pendidikan berada pada kategori berkualitas dengan skor rata-rata 4,09.
3. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berada pada kategori berkualitas dengan skor rata-rata 4,09.
4. Pengawasan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelopran, dan tindak lanjut hasil pengawasan berada pada kategori kurang berkualitas dengan skor rata-rata 3,51.
5. Pengawasan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah berada pada kategori kurang berkualitas dengan skor rata-rata 3,54

Hal ini membuktikan bahwa Kualitas Pengawasan Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara berkualitas, dan diharapkan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat di pertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada indikator pertama yaitu yang mendapat skor terendah adalah kepala sekolah merumuskan kriteria keberhasilan kegiatan pengawasan. Kepala sekolah seharusnya merumuskan terlebih dahulu apa saja kriteria yang akan diperoleh setelah melakukan kegiatan pengawasan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara, sehingga setelah melakukan kegiatan pengawasan, kepala sekolah mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan sudah mencapai kriteria yang diinginkan atau belum.
2. Pada indikator kedua yaitu yang mendapat skor terendah adalah penyusunan program pengawasan bidang keuangan didasarkan pada standar pembiayaan pendidikan. .Diharapkan agar kepala sekolah di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara untuk dapat menyusun program pengawasan bidang keuangan dengan berpedoman kepada standar pembiayaan yang telah ditetapkan.
3. Pada indikator ketiga yaitu yang mendapat skor terendah adalah program pengawasan disosialisasikan oleh kepala sekolah melalui berbagai cara.. Disini diharapkan kepala sekolah dapat mensosialisasikan program pengawasan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai cara, agar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat memahami apa tujuan dari pengawasan tersebut dan dengan begitu pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Pada indikator keempat yaitu yang mendapat skor terendah adalah kepala sekolah melakukan upaya pengembangan terhadap hasil kerja. Dalam hal ini

diharapkan agar kepala sekolah dapat melakukan kegiatan pengembangan terhadap hasil kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, agar hasil kerja yang sudah baik, dapat menjadi lebih baik lagi dengan adanya kegiatan pengembangan tersebut.

5. Pada indikator kelima yaitu yang mendapat skor terendah adalah kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dalam hal ini diharapkan kepala sekolah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan.. Dengan adanya peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, tenaga pendidik akan lebih mempersiapkan apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk menunjang jalannya proses pembelajaran yang baik. Pengawasan kepala sekolah yang berkualitas dan berkelanjutan sangat menentukan terhadap kualitas dan hasil pembelajaran. .
6. Penulis menyarankan kepada peneliti lanjutan untuk menelaah serta meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan pengawasan oleh Pimpinan dengan tempat penelitian yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti-peneliti yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mulyasa. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Arikunto, S, (2003). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, edisi revisi. Bumi Aksara. Yogyakarta
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dewi, Selfi Kusuma. (2015). Pengawasan Akademik Oleh Pengawas Sekolah Dasar Se-Kabupaten Bantul. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Fayol, Harahap (2001). *Sistem Pengawasan*. Jakarta:
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 menjelaskan Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- PP No. 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Rineka Cipta.
- Sagala, Syaiful., (2011), *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta.
- Sallis. (2010). *Total quality Management in Education*. Jogyakarta : RciSoD
- Suhardan, Dadang. 2006. *Supervisi bantuan Profesional*. Bandung : Mutiara Ilmu
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafaruddin, Asrul. (2014). *Manajemen Kepengawasan Pendidikan*. Medan: Citapustaka Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Bab II Pasal 3